

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti ingin membahas bagaimana kompleksitas konflik yang terjadi di Papua. Kompleksitas konflik Papua peneliti gunakan untuk memperoleh penggambaran bagaimana akar permasalahan konflik yang terjadi di Papua. Khususnya, bagaimana keterkaitan antara PT. Freeport Indonesia terhadap konflik di Papua. Peneliti juga ingin menggambarkan apa upaya pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Di sisi lain, peneliti juga menggambarkan secara umum bagaimana peliputan soal Konflik Papua di kedua media, baik Koran Tempo maupun SKH Kompas. Peneliti juga menggambarkan bagaimana keunikan dari Koran Tempo dan Kompas. Koran Tempo dengan ideologi independensinya punya peluang untuk menerapkan jurnalisme damai, demikian juga Kompas dengan ideologi humanisme transendental-nya. Lantas, apa itu ideologi independensi dan apa itu ideologi humanisme transendental, itulah yang peneliti deskripsikan dalam bab ini.

A. Kompleksitas Konflik Papua

1. Papua, Kabupaten Mimika dan Freeport

Status Provinsi Papua sebagai daerah otonomi khusus yang diterapkan sejak 1999, ternyata belum mampu menyelesaikan akar permasalahan konflik di Papua. Arie Sujito dalam bukunya Meretas Perdamaian di Tanah Papua tahun

2009, menyebutkan bahwa salah satu pemicu konflik Papua ialah kehadiran Freeport di Papua.

Salah satu pemicu terjadinya kesenjangan adalah hadirnya berbagai perusahaan multinasional di Papua.beroperasinya perusahaan multinasional yang bernama Freeport McMoran Copper and Gold (sekarang PT Freeport Indonesia). Perusahaan ini setiap hari menggali dan memindahkan sebanyak 700.000 metrik ton yang mengandung emas dan tembaga.....itu semua merugikan kehidupan suku Amungme dan Kamoro.⁶⁵

Temuan Arie Sujito tersebut, sejalan dengan penemuan LIPI tahun 2008 bahwa salah satu akar penyebab konflik ialah marginalisasi orang asli Papua, terutama soal ekonomi, sebagai efek migrasi.⁶⁶ Senada dengan Arie Sujito, Noveina Dugis dalam penelitiannya soal Pers dan Perang Suku di Timika mengatakan ada kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan yang masih primitif dan tradisional masih dijalani oleh hampir seluruh masyarakat Papua.⁶⁷

Pada hal kenyataan itu sangat kontras bila dibandingkan kemajuan Kabupaten Mimika, tempat perusahaan multinasional PT. Freeport Indonesia beroperasi.

Masuknya perusahaan bermodal asing pertama di Indonesia membuka keterisolasian daerah di tanah Papua yang dikelilingi hutan, perairan, dan pegunungan ini. Infrastruktur terbangun dengan keberadaan kota modern, lapangan terbang, pelabuhan laut dan fasilitas jalan. Lapangan kerja di Kabupaten Mimika pun cukup terbuka meski tidak seratus persen menyerap penduduk lokal.⁶⁸

⁶⁵Sujito, Arie. *op. cit.* h. 33

⁶⁶Lihat hasil rangkuman Centre for Humanitarian Dialogue dari hasil penelitian LIPI yang berjudul *Papua Road Map* tahun 2008. Cate Buchanan (Ed). 2011. *Pengelolaan Konflik di Indonesia*. Geneva: Centre for Humanitarian Dialogue. h. 39

⁶⁷Dugis, Noveina Silviyani. 2008. *Pers dan Konflik Perang Suku di Timika*. Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. h. 85

⁶⁸*Ibid.* h.80

Adanya sebuah perkembangan daerah di tengah masyarakat yang primitif dan tradisional menimbulkan *culture shock* dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Mimika. Philipus Wakerwa, Kepala Suku Dani dalam penelitian Dugis menegaskan bahwa kadangkala perubahan ini dihadapi dengan sikap emosional dan berujung pada adu kekuatan fisik.⁶⁹

Meski kasus Freeport versus Karyawan pada September-Desember 2011 silam sepintas merupakan konflik internal perusahaan, namun efek dari konflik internal ini menyulut konflik kekerasan di Papua muncul ke media. Presiden SBY akhirnya membentuk Unit Papua, Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) sebagai bentuk resolusi yang ditawarkan pemerintah pusat. Langkah itu (pembentukan UP4B) merupakan terobosan untuk mengoreksi langkah-langkah yang selama ini bersifat *business as usual* dalam menangani Papua.⁷⁰

Disisi lain, mogoknya karyawan berimbas pada lumpuhnya proses produksi Freeport. Padahal, beroperasinya Freeport memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah Kabupaten Mimika. Dugis dalam penelitiannya menyebut 96,6% persen atau Rp 11,3 triliun perputaran uang di kabupaten ini dihasilkan dari sektor pertambangan. Tahun 2002, Pemerintah Kabupaten Mimika menerima Rp 108,37 miliar dari PT Freeport Indonesia melalui pajak, retribusi atau bagi hasil.⁷¹

2. Papua dan Upaya Resolusi

⁶⁹*Ibid.* h.87

⁷⁰ Lihat Kompas edisi 1 November 2011. *Bangun Komunikasi Efektif dan Konstruktif*. Artikel Online: <http://nasional.kompas.com/read/2011/11/01/01403422/twitter.com> Tanggal Akses: 13 Maret 2013

⁷¹Dugis, Noveina Silviyani. *op. cit.* h. 81

Intensnya kasus Freeport vs Karyawan dibarengi dengan penembakan oleh aparat di Kongres Papua III. Dimana pemerintah pusat menganggap Kongres Papua III sebagai kegiatan separatisme.

Dalam penelitian LIPI, Papua Road Map, tahun 2008 menyebutkan bahwa adanya perbedaan pemahaman yang mendasar terhadap sejarah antara Jakarta dan Papua. Perbedaan inilah yang menyebabkan adanya Kongres Papua III untuk memisahkan diri dari NKRI.

Keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI, kemudian berdampak kepada mahasiswa asal Papua yang studi di Yogyakarta. Intimidasi secara rasial ditundingkan kepada mereka.

Berikut ialah skema masalah, resolusi dan capaian untuk Konflik Papua yang didasarkan atas penelitian LIPI, Papua Road Map pada tahun 2008:

Tabel 2.1
Skema Masalah, Resolusi dan Capaian untuk Konflik Papua

Masalah	Resolusi	Capaian
Sejarah dan Status Politik	Dialog	Moderasi Politik dan Negosiasi
Kekerasan Negara dan Pelanggaran HAM	Rekonsiliasi dan Pengadilan HAM	Hubungan Politik yang Konstruktif
Kegagalan Pembangunan	Paradigma Baru Pembangunan	Kemakmuran dan Kesejahteraan Penduduk Papua
Marjinalisasi dan diskriminasi	Rekognisi	Pemberdayaan Orang Asli Papua

Sumber: Ishak, Otto Syamsuddin. 2012. Dalam Bunga Rampai *Oase Gagasan Papua Damai*. Jakarta: Imparsial. h. 5

Saat pemetaan konflik Papua, Papua Road Map dikeluarkan LIPI pada tahun 2008, media hendaknya menggunakan hasil pemetaan tersebut dalam penulisan

beritanya sebagai bentuk penerapan jurnalisme damai. Jurnalisme damai mengisyaratkan media berperan sebagai bagian dari resolusi konflik. Oleh karenanya, media dapat menggunakan resolusi konflik dalam skema yang telah dibuat LIPI sebagai panduan dalam pemberitaan konflik Papua. Namun ternyata, media belum mampu untuk mengambil bagian dalam resolusi konflik. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberitaan soal korban konflik dan bagaimana konflik berjalan, bukan mengarah kepada resolusi konflik. Media juga belum mampu mengambil bagian sebagai rekognisi atas marjinalisasi dan diskriminasi Orang Papua. Hal itu ditunjukkan dengan adanya diskriminasi mahasiswa asal Papua di Yogyakarta.

B. Peliputan Konflik Papua di Koran Tempo dan SKH Kompas

Koran Tempo secara intens menghadirkan peliputan Konflik Papua sejak 16 September 2011. Dimana yang disorot pertama kali ialah soal mogoknya karyawan PT. Freeport Indonesia yang tertuang dalam berita yang berjudul “Ribuan Pekerja Mogok, Freeport Lumpuh”. Persoalan ini mendapat sorotan dari Koran Tempo hingga persoalan renegotiasi kontrak tambang pada tanggal 21 Oktober 2011 dalam berita yang berjudul “Kontraktor Tambang Dipaksa Lakukan Renegosiasi”. Sejak 23 Oktober 2011 hingga 27 Oktober 2011, pemberitaan Koran Tempo lebih menyorot soal kelompok bersenjata di Papua, mulai dari pengejaran pelaku penembakan hingga pengiriman pasukan tambahan ke Papua. Namun, permasalahan mogoknya karyawan PT Freeport Indonesia kembali muncul pada tanggal 28 Oktober 2011 hingga 29 Oktober 2011. Namun, sejak 30 Oktober 2011 Koran Tempo lebih menyorot soal dugaan aliran dana dari PT

Freeport Indonesia ke TNI/Polri serta permasalahan Freeport dengan karyawan beserta dengan renegotiasi kontrak tambang.

Di sisi lain, Kompas secara intens menghadirkan permasalahan Konflik Papua sejak 16 September 2011 dalam berita yang berjudul “Pekerja Freeport Mogok Kerja”. Dari 16 September 2011 hingga 3 Oktober 2011, SKH Kompas tetap menyorot kasus mogok karyawan Freeport, baru pada tanggal 8 Oktober 2011, SKH Kompas menyorot soal renegotiasi kontrak karya. Tanggal 20 Oktober 2011, SKH Kompas kemudian menyorot Kongres Papua III yang tertuang dalam berita yang berjudul “Lebih dari 200 Peserta ditangkap Aparat”.

Perbedaan Koran Tempo dan SKH Kompas dalam fokus pemberitaan soal Konflik Papua terlihat dalam pemberitaan di bulan November. SKH Kompas menurunkan tensi pemberitaan dengan memunculkan wacana pemberitaan yang berisikan solusi-solusi untuk masalah Papua. Sedangkan, Koran Tempo justru menaikkan tensi pemberitaan dengan mengekspos soal adanya dugaan aliran dana dari PT Freeport Indonesia ke TNI/Polri.

Di bulan November, SKH Kompas lebih menampilkan soal proses penyelesaian Konflik Papua. Tanggal 1 November 2011, SKH Kompas menurunkan tensi pemberitaan yang meninggi di bulan sebelumnya dengan menerbitkan berita yang berjudul “Bangun Komunikasi Efektif dan Konstruktif”. Di sisi lain, Koran Tempo yang pada tanggal 29 Oktober 2011 menerbitkan berita “Dana Freeport Ancam Netralitas Aparat”, justru meningkatkan tensi pemberitaan pada bulan November 2011 dengan menerbitkan berita yang berjudul “Kepolisian Diminta Transparan Soal Dana Freeport”.

C. Ideologi Koran Tempo

Pada bagian ini, peneliti mendeskripsikan bagaimana keunikan redaksi Koran Tempo serta bagaimana perhatian Koran Tempo soal jurnalisme damai. Keunikan redaksi ini didasarkan atas temuan Anett Keller dalam penelitiannya soal otonomi redaksi di 4 media cetak nasional tahun 2009. Karena dia (Koran Tempo) dimiliki oleh publik yang tidak terpusat pada satu tangan, seperti ada beberapa media lain di Indonesia.⁷² Kepemilikan yang tidak berada dalam satu tangan ini menjadikan Koran Tempo lebih independen. Kita (wartawan) di Tempo bisa dengan mudah menulis apa yang dianggap bersama di sini sebagai sebuah kebenaran.⁷³ Namun keleluasan penulisan berita oleh wartawan Koran Tempo dihadapkan pada sebuah tantangan, yakni profesionalisme wartawan, khususnya dalam peliputan konflik. Lantas bagaimanakah bila yang menulis berita bukan seorang wartawan melainkan seorang koresponden?

1. Posisi Koresponden dalam Dapur Redaksi

Koresponden merupakan posisi yang unik di dalam redaksi Koran Tempo. Koresponden ditujukan untuk posisi reporter daerah, hanya saja bukan sebagai karyawan tetap dan bukan *freelance*. Koresponden diikat melalui Perjanjian Kemitraan Penyediaan Berita.

⁷² Keller, Anett. *loc. cit.* h.59

⁷³ *Ibid.*

Tabel 2.2
Tarif Upah Per Berita Koran Tempo

Lampiran 1 : Harga Berita

A. Tempo News Room

Kategori	Harga	
Berita HL Luar Koran Tempo		
• Tunggal	Rp 150.000	
• Gabungan	Rp 70.000	
Berita HL Dalam Koran Tempo	Rp 80.000	
• Tunggal	Rp 60.000	
• Gabungan		
Berita Non HL Koran Tempo	Rp 70.000	
• Tunggal	Rp 60.000	
• Gabungan		
Breaking News Tempo Interaktif		
• Kategori A	Rp 60.000	
• Kategori B (adalah berita follow up, utk melengkapi berita yg sudah dikirim)	Rp 35.000	
• Kategori C	tidak dimuat	
Feature 2 Hal (6.000 K)	Rp 200.000	
Feature 1 Hal (4.000 K)	Rp 100.000	
Penugasan Khusus	Rp 125.000	

Sumber: Surat Keputusan Perjanjian Penyediaan Jasa Berita 2012

Dalam kasus konflik Papua, wartawan yang meliput bukanlah reporter, melainkan koresponden. Dengan sistem pengupahan per berita, koresponden berlomba-lomba agar beritanya naik cetak. Kekhawatiran akan munculnya *sensational news* dalam pemberitaan koresponden soal konflik Papua patut dipertimbangkan. Sulit dipungkiri bahwa pers kita secara sadar atau tidak telah mengkomodifikasi (menjadikan komoditi) berita konflik.⁷⁴ Padahal, peliputan kekerasan dalam konflik menyediakan ruang bagi media untuk melakukan peliputan *sensational news*.

⁷⁴Sirait, P. Hasudungan. *op. cit.* h. 215

Sensationalism in the news was conceived mostly in terms of story content, such as stories about crime, violence, natural disasters, accidents, and fires.⁷⁵

Dengan sistem pengupahan per berita, peluang bagi koresponden untuk mengkomodifikasi berita konflik terbuka lebar, meski disisi lain ketatnya editing naskah di dalam redaksi Koran Tempo juga dijalankan. Koresponden yang memiliki kepala biro semisal Jateng-DIY dan Makassar, proses editing naskahnya langsung kepada redaktur di masing-masing biro. Namun, untuk koresponden Papua, editing naskah langsung dijalankan oleh redaksi Koran Tempo pusat dengan memanfaatkan *intranet*.

Di sini menunjukkan bahwa meski ada kemungkinan koresponden melakukan pemberitaan yang *sensational news* akibat status koresponden, tetapi ideologi independensi diterapkan ketat oleh redaksi melalui alur manajemen redaksi yang melalui banyak *gatekeeper*. Selain itu, redaksi juga hanya menerima berita yang sumber-sumbernya lengkap. Yang juga dituntut adalah laporan yang detail, eksklusif dan *cover both sides*.⁷⁶

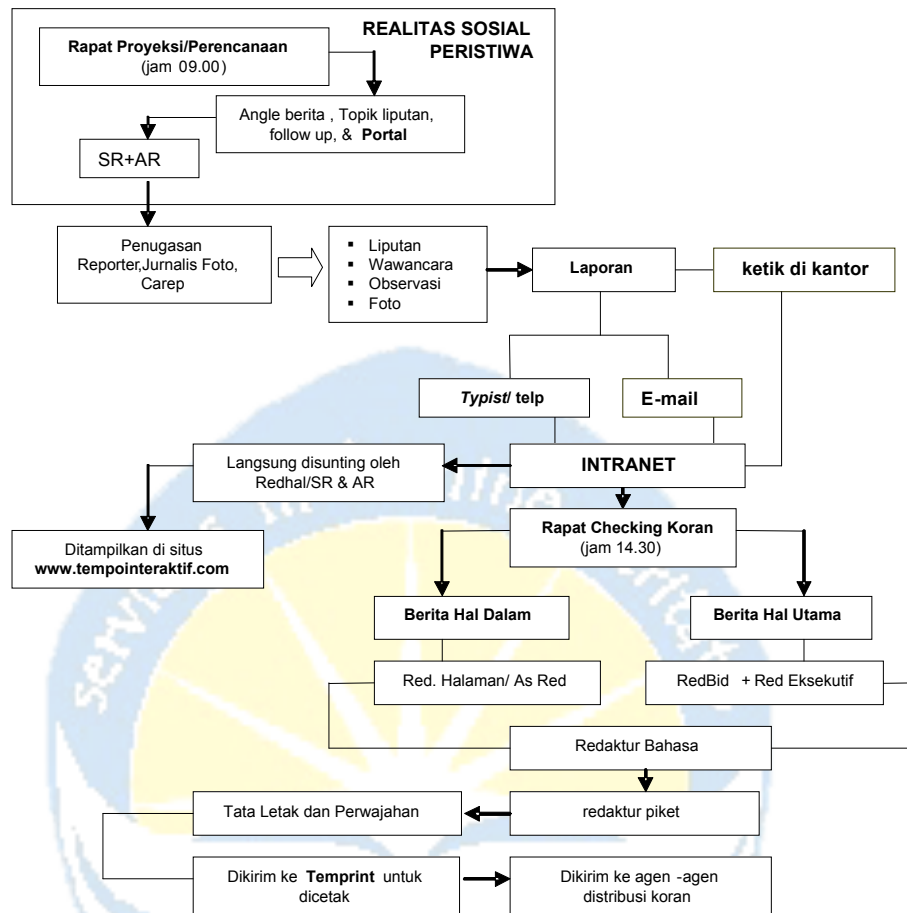
Ideologi independensi ini berguna untuk melakukan peliputan yang mengarah kepada jurnalisme damai. Peralnya, dengan minimnya pengaruh manajemen perusahaan ke dalam redaksi, maka *conflict of interest* pun dapat diminimalisasi. Di sini, ideologi akan berguna agar media tidak cenderung sebagai propaganda dan memihak pihak tertentu yang menjadi stakeholder manajemen perusahaan.

⁷⁵De Regt, Ingrid. 2009. *Sensational News Reporting And Its Effect On Corporate Reputation: Harming The Innocent*. Skripsi: Universitas Twente. h. 3

⁷⁶Setyarso, Budi. *op. cit.* h. 95

Bagan 2.1

Proses Lengkap Produksi Berita PT. TIMH



Sumber: Laporan KKL Maria Elga Ratri Ayudi. 2008. *Manajemen Redaksional Surat Kabar Koran Tempo*.h.86

Dalam bagan di atas dapat dilihat bahwa setelah berita masuk ke dalam intranet, berita yang akan naik cetak di Koran Tempo, masih melalui beberapa *gatekeeper* yakni, Redaktur Halaman, Redaktur Bidang, Redaktur Eksekutif, Redaktur Bahasa dan Redaktur Piket.

Di sini dapat dipahami meski ada kemungkinan koresponden melakukan peliputan yang *sensational news*, namun Koran Tempo tetap menjaga independensinya melalui tahapan yang sangat ketat di dalam redaksi.

2. Perhatian Soal Jurnalisme Damai

Sulit memang melacak data otentik soal perhatian Koran Tempo pada jurnalisme damai. Namun salah satu kutipan yang menarik, ada pada induk peliputannya, Majalah Tempo. Mantan Presiden Republik Indonesia, Soeharto, sebelum membredel Tempo memberikan pernyataan yang mungkin ada kaitannya dengan jurnalisme damai. Ada pers yang mengeruhkan situasi dan mengadu domba.⁷⁷

Pernyataan tersebut mungkin menggambarkan posisi Tempo dalam jurnalisme damai. Dalam kategorisasi Johan Galtung soal jurnalisme damai yang diterbitkan Transcend tahun 2005, pers yang melakukan propaganda masuk ke dalam jurnalisme perang. Namun, pernyataan ini tidak dapat menyimpulkan bahwa Tempo lebih menerapkan jurnalisme perang. Sebab, Tempo memiliki karakteristik jurnalisme sendiri, yakni jurnalisme prihatin.

Jurnalisme sebagai sebuah posisi etis yang diteguhkan Y.D. (Yusril) adalah kerja kewartawanan dengan sikap yang memandang orang lain dan merasa bertanggung jawab: jurnalisme yang tampil dengan kukuh bukan karena ia merasa unggul, melainkan ketika ia prihatin. Dengan keprihatinan kepada liyan, orang lain yang juga sesama, ia bertindak.⁷⁸

Keprihatinan inilah yang sebenarnya menentukan posisi Tempo dalam jurnalisme damai. Dengan rasa prihatin ini, Tempo dengan penulisan jurnalistiknya, menerapkan jurnalisme damai yakni dengan menyuarakan pihak-pihak yang lemah dan tak mampu bersuara dalam konflik.

Selain itu, bukti bahwa Tempo juga menaruh perhatian pada jurnalisme damai, tampak pada diskusi terbuka yang diadakan Tempo pada 21 Juni 2001. Diskusi

⁷⁷ Setyarso, Budi. *op. cit.* h.32

⁷⁸ *Ibid.* h.148

tersebut mengambil tema “Membangun Solidaritas untuk Jurnalisme Damai Memperingati Pembredelan Majalah Tempo.”⁷⁹

D. Ideologi SKH Kompas

1. Falsafah Humanisme Transendental

SKH Kompas terkenal dengan falsafahnya, humanisme transendental. Namun pertanyaannya, apa itu humanisme transendental dan bagaimana falsafah ini dijalankan dalam proses peliputannya?

Peneliti akan membahas sedikit soal falsafah ini. Humanisme transendental tak lepas dari sosok salah satu pendiri Kompas, Jakob Oetama. Memang manusia, pengalaman akan kemanusiaan dan kemanusiaan sendiri adalah kunci pokok yang menjadi keprihatinan Jakob Oetama.⁸⁰

Keprihatinan inilah yang dibawa Jakob Oetama dalam pengelolaan Kompas pasca meninggalnya PJ Ojong pada Mei 1980. Jakob Oetama sendiri sering terlalu mengandaikan bahwa para wartawannya akan paham dengan humaniora dan mampu menulis berita yang humanis.⁸¹

Di sinilah bahwa humanisme transendental sangat erat kaitannya dengan kemanusiaan. Awalnya dipakai istilah humanisme transendental, tetapi sejak tahun 2000-an Jakob Oetama lebih sering memakai kata kemanusiaan yang

⁷⁹ Lihat foto dan caption foto pada halaman web tempo.

http://www.tempo.co.id/hg/luarnegeri/2005/09/30/complete_gallery_brk,20050930-67314.id.html

Tanggal Akses: 1 Juni 2013

⁸⁰Sindhunata. 2001. *Menatap Masa Depan Humanisme di Indonesia Bersama Kompas* dalam bunga rampai *Humanisme dan Kebebasan Pers*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. H.1

⁸¹*Ibid.* h.28

beriman.⁸² Namun istilah ini kiranya belum melekat ketimbang humanisme transendental.

Menurut Cornelius Antonius Kees de Jong, penamaan itu merupakan pengembangan makna *compassion*, yang antara lain memuat harapan manusia untuk bisa bertenggang rasa karena setiap orang bisa berbuat salah.⁸³ Lebih lanjut, menurut Jong, *compassion* artinya keterharuan, menaruh belas kasihan pada manusia.⁸⁴

Humanisme transendental ini juga memiliki kaitan erat dengan jurnalisme damai. Rekonsiliasi merupakan salah satu aspek yang dapat menciptakan jurnalisme damai.⁸⁵ Dalam rekonsiliasi perlu adanya dialog dari pihak-pihak yang bertikai. Hal itu ditujukan agar konflik tidak mengarah kepada kekerasan. Kompas dalam pemberitaannya, sangat mengakomodir adanya dialog. Keinginan Kompas ialah mendorong orang untuk berdialog, berkomunikasi dan oleh karena itu dialog harus dikembangkan.⁸⁶

Kemiripan lain ialah Johan Galtung di kategori Orientasi pada Rakyat menyebut syarat jurnalisme damai ialah memberikan suara untuk pihak yang lemah. Kompas pun ternyata turut mengisyaratkan hal ini dalam pemberitaannya. Menyuarakan mereka yang tak bisa bersuara, itulah yang diinginkan Jakob Oetama bagi wartawannya.⁸⁷

⁸² Sularto. *op. cit.* h. 130

⁸³ *Ibid.* h. 131

⁸⁴ Jong, Kees de. 2001. *Humanisme Transendental yang Kadang Perlu Diteriakkan* dalam bunga rampai *Humanisme dan Kebebasan Pers*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. h.28.

⁸⁵ Lihat tabel Jurnalisme damai Johan Galtung pada penelitian ini.

⁸⁶ Jong, Kees de. *op. cit.* h.32

⁸⁷ Sindhunata. *op. cit.* h. 6

2. Perhatian Soal Jurnalisme Damai

Meski memiliki beberapa kemiripan antara humanisme transendental dengan jurnalisme damai, peneliti kemudian mengakses beberapa sumber otentik untuk membuktikan bahwa Kompas memiliki perhatian terhadap jurnalisme damai.

Salah satunya dari tulisan M. Kabul Budiono, *broadcaster* di Lembaga Penyiaran Publik RRI yang ditulis di Kompasiana. Koran ini, setidaknya dalam penilaian saya, melaksanakan model pemberitaan yang sangat berbeda yaitu pemberitaan media yang menggunakan pendekatan jurnalisme damai (*peace journalism*).⁸⁸

Senada dengan M. Kabul Budiono, Adrianus Satrio Nugroho dalam penelitiannya menyebut bahwa Kompas menggunakan jurnalisme damai dalam pemberitaannya. Kompas lebih banyak memberitakan klaim Malaysia atas seni budaya milik Indonesia dengan tujuan damai daripada perang.⁸⁹

Di sisi lain, Kompas juga mengadakan pelatihan-pelatihan jurnalistik dengan tema jurnalisme damai bagi jurnalis dari media lain. Salah satunya pelatihan yang diadakan di Kompas Jabar dengan nama “Pelatihan Interfaith Journalism” pada 18 Oktober 2008. Dalam pelatihan yang terdiri dari 22 orang aktivis lintas iman (Majalah Lintas Iman), Sartono, yang kala itu menjabat sebagai editor Harian Umum Kompas Jabar menjelaskan bahwa kebanggaan dan

⁸⁸Budiono, M. Kabul. 2012. *Jurnalisme Damai dalam Konflik Sosial*. [Artikel online: http://media.kompasiana.com/mainstream-media/2012/11/01/jurnalisme-damai-dalam-konflik-sosial-505154.html](http://media.kompasiana.com/mainstream-media/2012/11/01/jurnalisme-damai-dalam-konflik-sosial-505154.html) Tanggal Akses: 11 Februari 2013

⁸⁹ Adinugroho, Adrianus Satrio. *op. cit.* h. 63

keberhasilan wartawan bukan pada menyiarkan berita apa adanya, tetapi ada sensor.⁹⁰

Pelatihan bagi jurnalis muda pun tak luput dari perhatian Kompas untuk menanamkan konsep jurnalisme damai bagi jurnalis masa depan. Salah satunya ialah pelatihan dengan Himpunan Mahasiswa Jurnalistik FIKOM Universitas Padjajaran, Desember 2012. Dalam pelatihan dengan tema Jurnalisme Damai tersebut, Kompas hadir sebagai pemateri yang diwakili oleh Abie Besman.⁹¹



⁹⁰ Alimah, 2008. *Jurnalisme Damai Menciptakan Harmony di Tengah Konflik*. Artikel Online: <http://www.fahmina.or.id/index.php/artikel-a-berita/berita/452-jurnalisme-damai-menciptakan-harmoni-di-tengah-konflik.html> Tanggal Akses: 11 Februari 2013

⁹¹ Lihat blog HMJ FIKOM UnPad <http://hmjunpad.tumblr.com/> Tanggal Akses: 11 Februari 2013